

# Laporan Kinerja (LKJ)



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018 - 2023).

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari tujuh (7)



indikator kinerja utama, terdapat tiga indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih.

*Pangkajene Sidrap, Januari 2020*  
**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,**

**H. SYAHRUL SYAM, S.H., M.H**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19701206 199303 1 007



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai. IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu : APK Pendidikan Anak Usia Dini, Persentase PAUD Berakreditasi, dan Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu : Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Persentase Guru Bersertifikasi di semua jenjang pendidikan, dan Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan indikator kinerja utama pada sasaran Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
*Kabupaten Sidenreng Rappang*

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	2
3. Gambaran Umum Organisasi .....	2
4. Isu Strategis .....	3
5. Struktur Organisasi .....	3
6. Komposisi SDM Organisasi .....	5
7. Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	9
1. Rencana Strategis .....	9
1.1 Visi dan Misi .....	9
1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja .....	9
1.3 Sasaran dan Indikator Kinerja .....	9
1.4 Program untuk Pencapaian Sasaran .....	11
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	11
3. Indikator Kinerja Utama .....	12
4. Rencana Anggaran Tahun 2019.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
1. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	15
1.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
1.3 Realisasi Anggaran .....	28
2. Analisa Efisiensi .....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	22



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
*Kabupaten Sidemeng Rappang*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Penyusun LAKIP/LKJ Tahun 2019

Lampiran 2. Penghargaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019

Lampiran 3. MOU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Jabatan Struktural.....	6
Tabel 1.2 Kualifikasi Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel 1.3 Kualifikasi Jenjang Eselon .....	8
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja.....	10
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja .....	10
Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .....	11
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 .....	12
Tabel 2.5 IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	13
Tabel 2.6 Rencana Belanja Tahun Anggaran 2019 .....	14
Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019.....	14
Tabel 3.1 Tabel Pencapaian Kinerja (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019 .....	16
Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	16
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 .....	28
Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	30





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ..... 5



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidenreng Rappang LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.



## **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

*Kabupaten Sidenreng Rappang*

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan, menunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan susunan dan struktur organisasi.



#### 4. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

- 1). Secara Umum hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih rendah, sehingga dibutuhkan langkah konkrit Pemerintah daerah dan Guru untuk meningkatkan Kompetensinya.
- 2). Masih banyaknya guru yang belum berijazah S1/D4, sehingga dibutuhkan terobosan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Guru sendiri.
- 3). Perlu kerja sama berkelanjutan antara Stakeholder untuk menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang layak.
- 4). Perlu langkah taktis oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengurangi angka Tuna Aksara.
- 5). Optimalisasi upaya Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan kebudayaan) dan Sekolah untuk meningkatkan Hasil Ujian Nasional.
- 6). Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Masyarakat butuh langkah strategis untuk memastikan Program Wajib Belajar 12 Tahun bisa terlaksana secara maksimal.

#### 5. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan susunan dan struktur organisasi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Keuangan.
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal, terdiri atas:
  - a) Kasi Kurikulum dan Penilaian.
  - b) Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
  - c) Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.



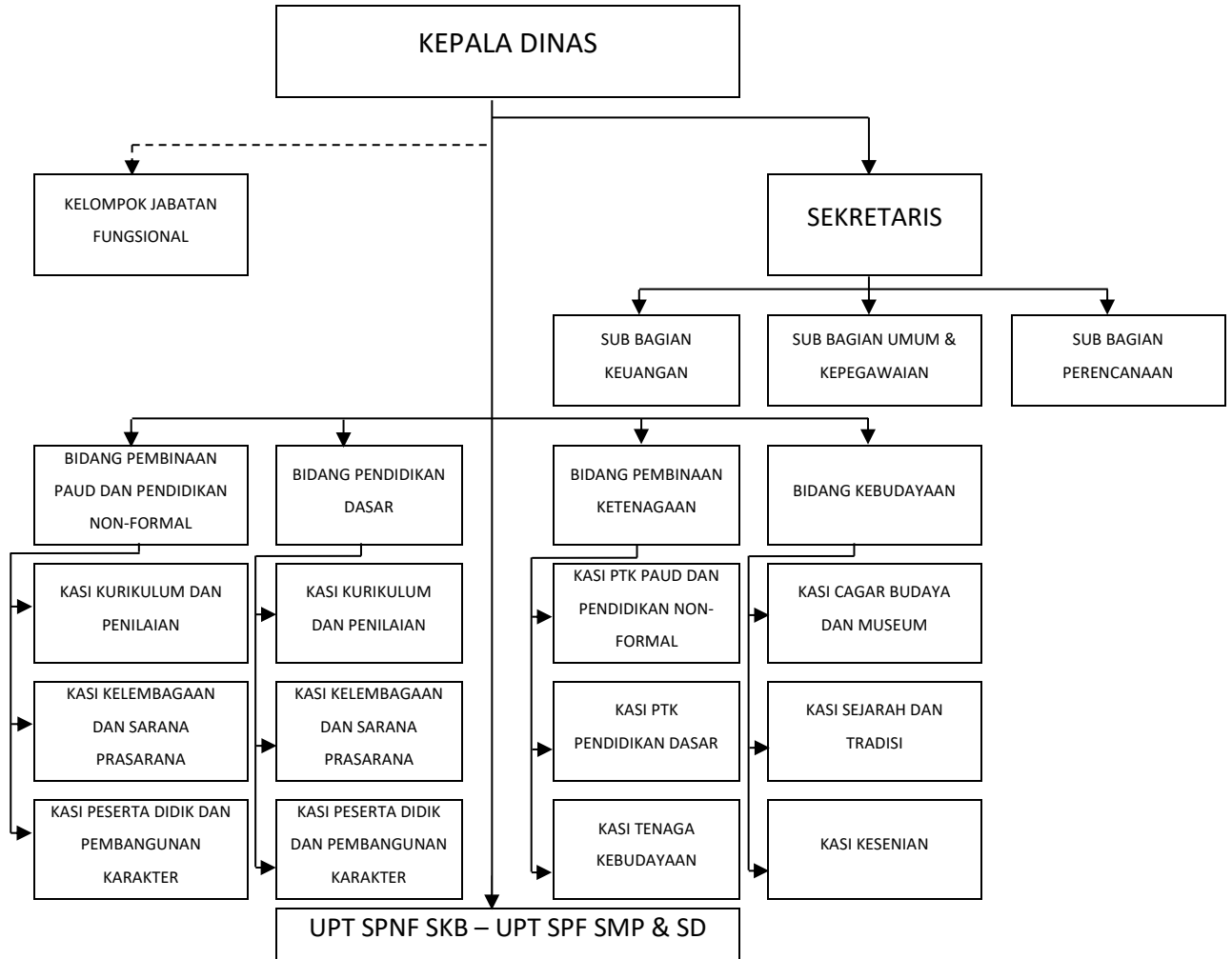
## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### *Kabupaten Sidenreng Rappang*

4. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas:
  - a) Kasi Kurikulum dan Penilaian.
  - b) Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
  - c) Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
  - a) Kasi PTK Paud dan Pendidikan Non-Formal.
  - b) Kasi PTK Pendidikan Dasar.
  - c) Kasi Tenaga Kebudayaan.
6. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
  - a) Kasi Cagar Budaya dan Museum.
  - b) Kasi Sejarah dan Tradisi.
  - c) Kasi Kesenian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan sebagai berikut :

**Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



## 6. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Komposisi SDM Organisasi dibedakan menjadi 3 jenjang, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan dibawah ini :

- A. Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Gender Tahun 2019 Berdasarkan data PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai akhir Desember 2019 dengan komposisi berdasarkan gender dengan jumlah pegawai sebanyak 122 orang masih di dominasi laki-laki sebanyak 80 orang sedangkan perempuan 42 orang dengan perbandingan lihat tabel dibawah ini:



**Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Jabatan Struktural**

No	Komposisi PNS Menurut Jenjang Jabatan Struktural			Jumlah
	Jabatan Struktural	Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	3	1	4
4	Kasubag	3	-	3
5	Kasi	8	4	12
6	Kepala UPTD	-	-	0
7	Kepala SKB	-	1	1
8	Pengawas	32	7	39
9	Penilik	3	3	6
10	KTU UPTD/SKB	1	-	1
11	Staff Disdikbud	28	22	50
12	Staff UPTD/SKB	1	3	4
Jumlah		80	42	122

- B. Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Berdasarkan data PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai akhir Desember 2019 dengan komposisi berdasarkan jenjang pendidikan dengan jumlah pegawai 122 orang, masih di dominasi S1 sebanyak 80 orang, S2 sebanyak 29 orang dan tamatan SMA sebanyak 13 orang dengan perincian lihat tabel dibawah ini :



**Tabel 1.2 Kualifikasi Jenjang Pendidikan**

No	Kualifikasi Jenjang Pendidikan				Jumlah
	Jabatan Struktural	Strata Satu (S1)	Strata Dua (S2)	SMA/ Sederajat	
1	Kepala Dinas	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	1	3	-	4
4	Kasubag	-	3	-	3
5	Kasi	10	1	1	12
6	Kepala UPTD	0	0	0	0
7	Kepala SKB	1	-	-	1
8	Pengawas	29	10	-	39
9	Penilik	4	2	-	6
10	KTU UPTD/SKB	1	-	-	1
11	Staff Disdikbud	33	8	9	50
12	Staff UPTD/SKB	1	-	3	4
Jumlah		80	29	13	122

C. Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2019

Berdasarkan data PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai akhir Desember 2019 berdasarkan jenis kelamin jabatan struktural dengan jumlah jabatan struktural sebanyak 41 orang masih di dominasi laki-laki sebanyak 26 orang sedangkan perempuan sebanyak 15 orang, dengan perbandingan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :





**Tabel 1.3 Kualifikasi Jenjang Eselon**

No	Kualifikasi Jenjang Eselon			Jumlah
	Jabatan Struktural	Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	3	1	4
4	Kasubag/Kasi	11	4	15
5	Kepala SKB	-	1	1
6	Kepala TU SKB	1	-	1
Jumlah		16	7	23

## 7. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Pada tahun 2019 dilaksanakan penyusunan RPJMD 2018-2023. Karenanya, juga dilaksanakan penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah “Optimalisasi Fungsi Museum Nene Mallomo Melalui Promosi Media Sosial”, dan melanjutkan program tahun sebelumnya seperti gerakan membaca 15 menit sebelum beraktivitas, dan mencanangkan gerakan sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakem (Si Hijau PAKEM).



## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 1. RENCANA STRATEGIS

#### 1.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program PD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis PD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Adapun yang menjadi sebagai dasar kebijakan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini bermuara atau didasarkan pada hasil penetapan Visi Bapak Bupati periode 2018 - 2023, yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”**.

#### MISI:

Sebagai tindaklanjut untuk mengaktualisasikan Visi tersebut, maka dirumuskanlah beberapa Misi yang berkaitan secara teknis operasional dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- b. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

#### 1.2 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dari perencanaan dan perjanjian kinerja adalah Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan untuk indikator kinerja dan target



kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja**

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
<b>1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan</b>	Indeks Pendidikan	Nilai	60,49	66,43
<b>2. Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal</b>	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	2,04	7
<b>3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</b>	Nilai Sakip Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Huruf	C (47,99)	BB (75)

### 1.3 SASARAN DAN INDIKATOR KERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah:

**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	49,17	75
	Persentase PAUD Berakreditasi	%	67,39	84
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,89	9
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	14
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	57,24	80
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesenjangan.	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	%	90,66	95



Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	50%	100
Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rata-rata capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	68,22	95
	Persentase Temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti.	Persen	91	100

#### 1.4 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	<b>Program Peningkatan Kualifikasi Dan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>
Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>
Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>

## 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Kabupaten Sidemeng Rappang

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	APK Pendidikan Anak Usia Dini	55%
	Persentase PAUD Terakreditasi	72%
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,1 Tahun
	Angka Harapan Lama Sekolah	13,20 Tahun
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	60%
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	91%
Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	50%
Meningkatnya Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rata-rata capaian Kinerja Perangkat Daerah	73,62%
	Persentase Temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti.	93%

### 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan IKU sebagai berikut:



Tabel 2.5 IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	APK Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak}}{\text{jumlah anak usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$	DAPODIK
		Persentase PAUD Berakreditasi	$\frac{\text{Jumlah TK Berakreditasi}}{\text{jumlah Seluruh TK}} \times 100\%$	DAPODIK
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Dan Lama Pendidikan Yang Ditamatkan}}{\text{jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas}} \times 100\%$	BPS
		Angka Harapan Lama Sekolah	$\frac{\text{Penjumlahan Dari Penduduk Yang Bersekolah Usia 7 - 23 Tahun Menurut Umur}}{\text{jumlah Penduduk Usia 7-23 Tahun Menurut Umur}} \times 100\%$	BPS
3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah guru bersertifikasi}}{\text{Jumlah guru SD/MI,SMP/MTs}} \times 100\%$	DAPODIK
4	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 th melek huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	BPS
5	Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	$\frac{\text{Jumlah Budaya Lokal Yang dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata}}{\text{Jumlah Seluruh Budaya Lokal}} \times 100\%$	BIDANG KEBUDAYAAN

#### 4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 403.273.293.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***Kabupaten Sidemeng Rappang*

Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6 Rencana Belanja Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	269.506.241.000	66,83%
2	Belanja Langsung	133.767.052.000	33,17%
<b>Jumlah</b>		<b>403.273.293.000</b>	<b>100,00%</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019**

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN
Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	APK Pendidikan Anak Usia Dini	3.266.181.000	2,44 %
	Persentase PAUD Terakreditasi		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	122.345.783.000	91,46 %
	Angka Harapan Lama Sekolah		
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	998.988.500	0,75 %
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	1.831.600.000	1,37 %
Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	1.315.985.000	0,98 %
Meningkatnya Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rata-rata capaian Kinerja Perangkat Daerah	4.008.514.500	3,00 %
	Persentase Temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti.		
<b>TOTAL</b>		<b>133.767.052.000</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.133.767.052.000 ,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun** yaitu sebesar **91,46%**, dimana di dalamnya termasuk pengelolaan DAK dan Dana BOS. Sementara itu, sasaran dengan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

*Kabupaten Sidemeng Rappang*

anggaran yang relatif kecil adalah sasaran **Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal** sebesar **0,98%** dari total anggaran belanja langsung.





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019. Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 3.1 Tabel Pencapaian Kinerja (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	55	58,23	105,87
2	Persentase PAUD Berakreditasi	%	72	80	111,11
3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,1	7,89	97,41
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	12,91	97,80
5	Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	60	45,95	76,58
6	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	%	91	91,67	100,74
7	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	55	50	90,91

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebanyak 7 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	> 91	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R



Dari 7 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

## 1.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2019 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

### SASARAN 1: Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</b>	1. APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	55	58,23	105,87
	2. Persentase PAUD Berakreditasi	%	72	80	111,11
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>108,49</b>

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini menunjukkan telah mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya**



**akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** ini telah berhasil melampaui target yaitu dengan rata-rata capaian **108,49** persen.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2017	2018	2019
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini	116,94%	86,26%	105,87%
2.	Persentase PAUD Berakreditasi	%	%	111,11%
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>116,94%</b>	<b>86,25%</b>	<b>108,49%</b>

Jika dilihat data capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** ini mengalami fluktuasi Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari **86,26 persen** pada tahun 2018 meningkat menjadi **108,49 persen** pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar **22,23 persen**.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	75%	58,23%	77,64%
2.	Persentase PAUD Berakreditasi	%	84%	80%	95,24%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka terdapat 1 indikator yang hampir mencapai target jangka menengah dan 1 indikator yang belum mencapai target jangka menengah, namun indikator yang belum mencapai target tersebut dapat dioptimalkan agar ditahun 2023 (tahun terakhir periode Renstra Dinas Pendidikan Dan



Kebudayaan/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dicapai.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** disebabkan oleh diantaranya pro aktifnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Bidang PAUD untuk mencari informasi dan mendistribuksikan kepada pengelola PAUD terutama terkait akreditasi dan maksimalisasi perbaikan Data Pokok PAUD untuk *verifikasi* anggaran DAK fisik maupun non fisik.

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** ini adalah sebesar Rp. 3.000.670.000,- dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 3.266.181.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.201.778.000,- atau 98,18 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **108,49 % berarti tingkat efisiensi sebesar 10,31%**.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** ini adalah: **Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini** dengan 5 kegiatan.

**SASARAN 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.**

a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.</b>	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,1	7,89	97,41%
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	12,91	97,80%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>97,61%</b>

Dari indikator kinerja diatas yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja sasaran belum mencapai target, dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun** ini baru mencapai **97,61 persen**.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2017	2018	2019
Angka Rata-rata Lama Sekolah	-	-	97,41%
Angka Harapan Lama Sekolah	-	-	97,80
<b>Rata-rata capaian</b>	-	-	<b>97,61%</b>

Capaian kinerja untuk kedua indikator ini, baru diukur pada tahun 2019 sebagai indikator sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun dengan rata-rata capaian 97,61 %**.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9	7,89	87,67%
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14	12,91	92,21%



Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kedua indikator pada sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun** tidak tercapai disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun** ini adalah sebesar Rp. 88.503.191.400,- dan setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp. 88.372.542.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 87.842.897.557,- atau 99,40 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **97,61 % berarti tingkat inefisiensi sebesar 1,79%.**

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun.** ini adalah: **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan 10** kegiatan. Dan Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan 1 Kegiatan.

### **SASARAN 3 : Meningkatkan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1. Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	60%	45,95%	76,58%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>76,58%</b>

Secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** ini belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian **76,58** persen.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2017	2018	2019
1.	Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	116%	90,27%	76,58%
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>116%</b>	<b>90,27%</b>	<b>76,58%</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** ini mengalami penurunan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 90,27 persen pada tahun 2018 menurun menjadi 76,58 persen pada tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar 13,69 persen.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	80	45,95	57,44





Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Penurunan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** disebabkan oleh banyaknya penambahan guru baru di satuan pendidikan sedangkan rombel tetap.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** adalah sebesar Rp. 1.052.988.500,- dan setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp. 998.988.500,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 945.659.746,- atau 94,66 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **76,58 % berarti tingkat inefisiensi sebesar 18,08%.**

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian **Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** ini adalah: **Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan 3 kegiatan dan Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) 2 Kegiatan.**

**SASARAN 4 : Meningkatkan Akses dan Layanan Pendidikan Kesetaraan.**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.</b>	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	%	91%	91,67%	100,74%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>100,74%</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran mencapai target. dan secara umum rata-rata pencapaian **Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan** ini telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian **100,74 persen**.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2017	2018	2019
Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	101,64%	99,10%	100,74%
<b>Rata-rata capaian</b>	<b>101,64%</b>	<b>99,10%</b>	<b>100,74%</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan** mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari **99,10 persen** pada tahun 2018 meningkat menjadi **100,74 persen** pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar **1,64 persen**.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	%	95	91,67	96,49

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan** disebabkan oleh proaktifnya Lembaga dalam melakukan pembelajaran terhadap masyarakat, dan pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama bidang PAUD PNF terhadap lembaga terkait penyelenggaraan paket, dan perbaikan data pokok sehingga bisa mendapatkan DAK.

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan** ini adalah sebesar Rp.1.795.100.000,- dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 1. 831.600.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.539.384.000,- atau 84,05 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **100,74 % berarti tingkat efisiensi sebesar 16,69 %.**

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian **Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan** ini adalah: **Program Pendidikan Non Formal** dengan 3 kegiatan.

#### **SASARAN 5: Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal**

a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	55	50	90,91%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>90,91%</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran belum mencapai target. dan secara umum rata-rata pencapaian **Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal** ini belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian **90,91 persen**.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2017	2018	2019
Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	%	90,91%
<b>Rata-rata capaian</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>90,91%</b>

Capaian kinerja untuk indikator ini, baru diukur pada tahun 2019 sebagai indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal** dengan rata-rata capaian 90,91 %.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	100	50	50%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah.



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian indikator pada **Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal** tidak mencapai target disebabkan oleh penetapan budaya yang masih sementara berjalan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal** ini adalah sebesar Rp.1.145.985.000,- dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp.1.315.985.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.261.572.919,- atau 95,87 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **90,91 % berarti tingkat efisiensi sebesar 4,96 %**.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan **Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal** ini adalah: **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** dengan 3 kegiatan dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan 3 Kegiatan.

### 1.3 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 97,42 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun** sebesar Rp.87.842.897.557,- (99,40%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan** sebesar Rp.1.539.384.000,- atau 84,05 %.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari



seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, yaitu sasaran **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan tahun** yang realisasi anggarannya mencapai 99,40 % namun realisasi kinerjanya baru mencapai **97,61 %** dan sasaran **Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** yang realisasi anggarannya mencapai 94,66 % namun realisasi kinerjanya baru mencapai **76,58 %**. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019**

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).				3.266.181.000,-	3.201.778.000,-	98,18
	APK Pendidikan Anak Usia Dini	55%	58,23%	105,87			
	Persentase PAUD Berakreditasi	72%	80%	111,11			



2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sembilan				88.372.542.000,-	87.842.897.557,-	99,40
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,1 Tahun	7,89 Tahun	97,41 %			
	Angka Harapan Lama Sekolah	13,20 Tahun	12,91 Tahun	97,80 %			
3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				998.988.500,-	945.659.746,-	94,66
	Persentase Guru Tersertifikasi di semua jenjang pendidikan	60%	45,95%	76,58%			
4	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Kesetaraan.				1. 831.600.000,-	1.539.384.000,-	84,05
	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	91%	91,67%	100,74%			
5	Meningkatnya Kualitas Budaya Lokal				. 1. 315.985.000,-	1.261.572.919,-	95,87
	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata	55%	50%	90,91			

## 2. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 5 sasaran 7 indikator sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 2 sasaran 3 indikator sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam



tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan pencapaian kinerja 108,49 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 98,18% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	<b>Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	APK Pendidikan Anak Usia Dini	105,87%	98,18%	1,82%
		Persentase PAUD Berakreditasi	111,11%		
2	<b>Berkembangnya Pendidikan Tinggi</b>	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	100,74	84,05%	15,95%





## BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 5 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke depan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

*Kabupaten Sidenreng Rappang*

bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

*Kabupaten Sidenreng Rappang*

**Lampiran-lampiran :**

Penghargaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019

MOU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019